

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungas Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

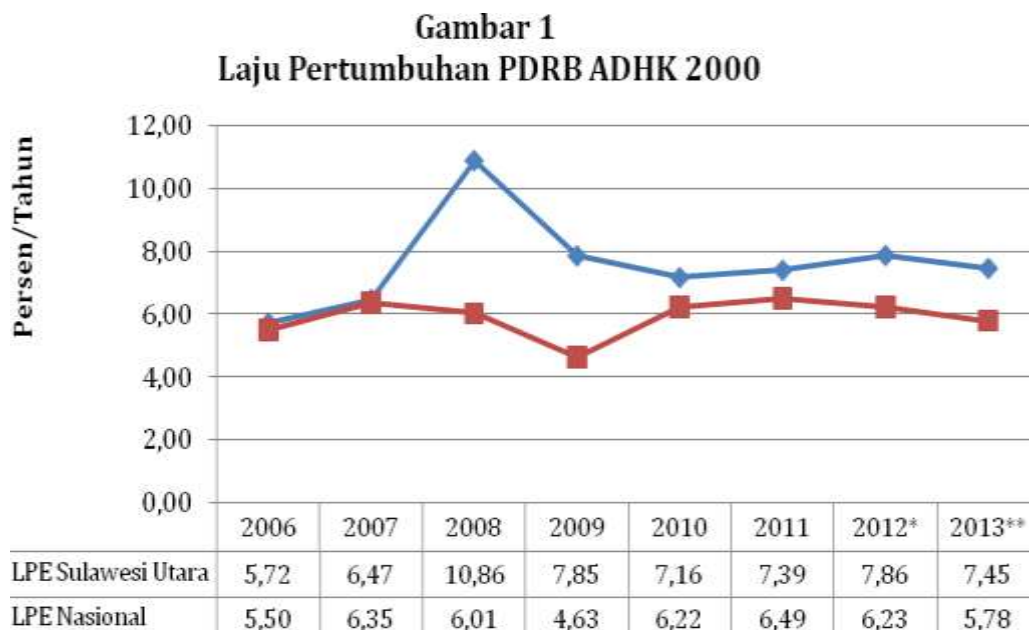
Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

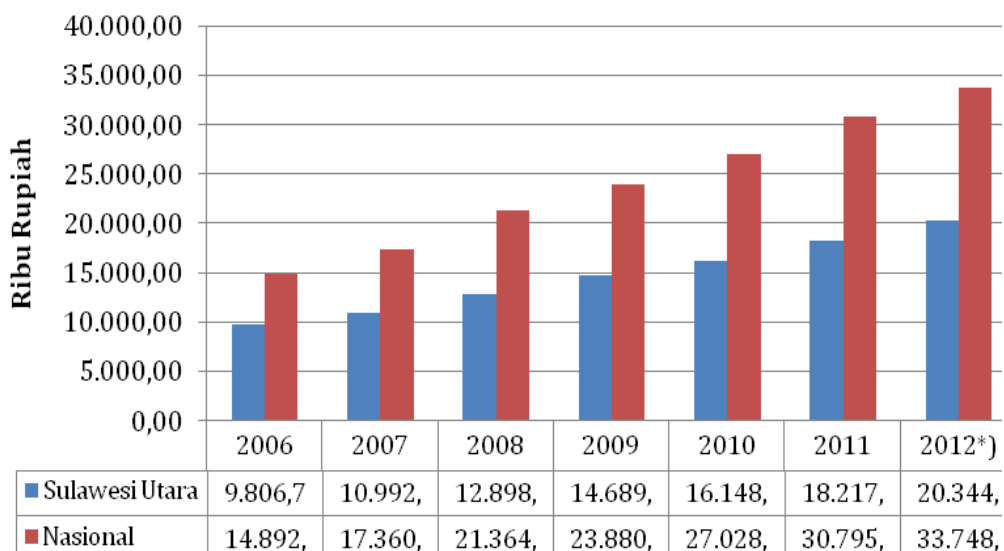
Provinsi Sulawesi utara berada pada posisi strategis karena terletak di Pasifik Rim yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara Asia Timur dan negara-negara Pasifik. Posisi strategis ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Provinsi ini juga turut mendukung peran Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan serta pertambangan nikel di tingkat nasional. Kinerja perekonomian Sulawesi Utara periode 2006-2013 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,60, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,90 persen pada periode yang sama (Gambar 1). Kontribusi Provinsi Sulawesi Utara terhadap pembentukan PDRB Sulawesi adalah sebesar 14,79 persen, sementara itu kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 0,70 persen.



Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Sulawesi Utara selama kurun waktu 2006-2012 cenderung meningkat walaupun masih berada di bawah angka nasional. Hal ini menunjukkan kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Utara juga meningkat meskipun relatif tidak baik secara nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Sulawesi Utara dan PDB nasional sebesar 65,85 persen, maka pada tahun 2012 rasionya mengecil menjadi 60,28 (Gambar 2). Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

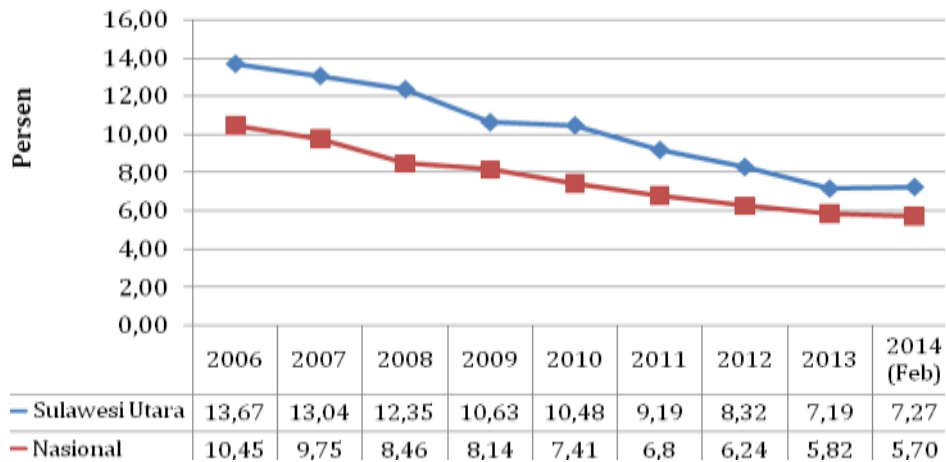


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Utara selama 2006-2013 berkurang sebesar 6,48 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun, namun pada periode 2006-2012 TPT Sulawesi Utara selalu berada di atas TPT Nasional (Gambar 3). Tingkat pengangguran yang tinggi di tengah pendapatan per kapita yang moderat mengindikasikan pengangguran tersebut kemungkinan besar merupakan tenaga yang tidak terdidik karena tidak berimbas secara langsung pada rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

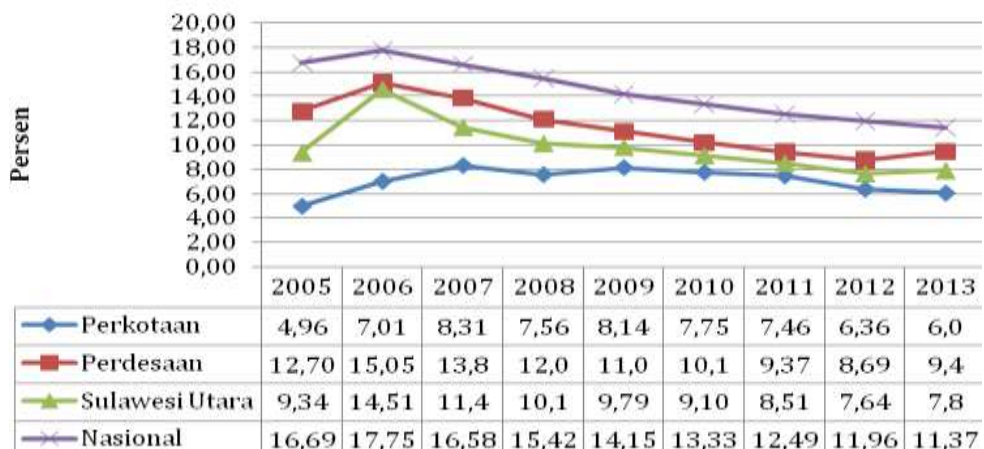


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Selama kurun waktu 2006-2013 persentase penduduk miskin di provinsi ini cenderung menurun, baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 4). Secara nasional persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara tergolong rendah. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di nasional sudah mencapai 11,37 persen, sedangkan di Sulawesi Utara sebesar 7,88 persen. Penduduk miskin di Sulawesi Utara terdiri atas dua kategori, yaitu penduduk miskin yang berpenghasilan jauh di bawah garis kemiskinan dan biasanya tidak memiliki akses cukup terhadap sumber daya ekonomi, dan penduduk miskin yang berada di dekat garis kemiskinan sehingga apabila terjadi sedikit saja perbaikan ekonomi maka mereka dapat meningkatkan statusnya menjadi penduduk tidak miskin.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

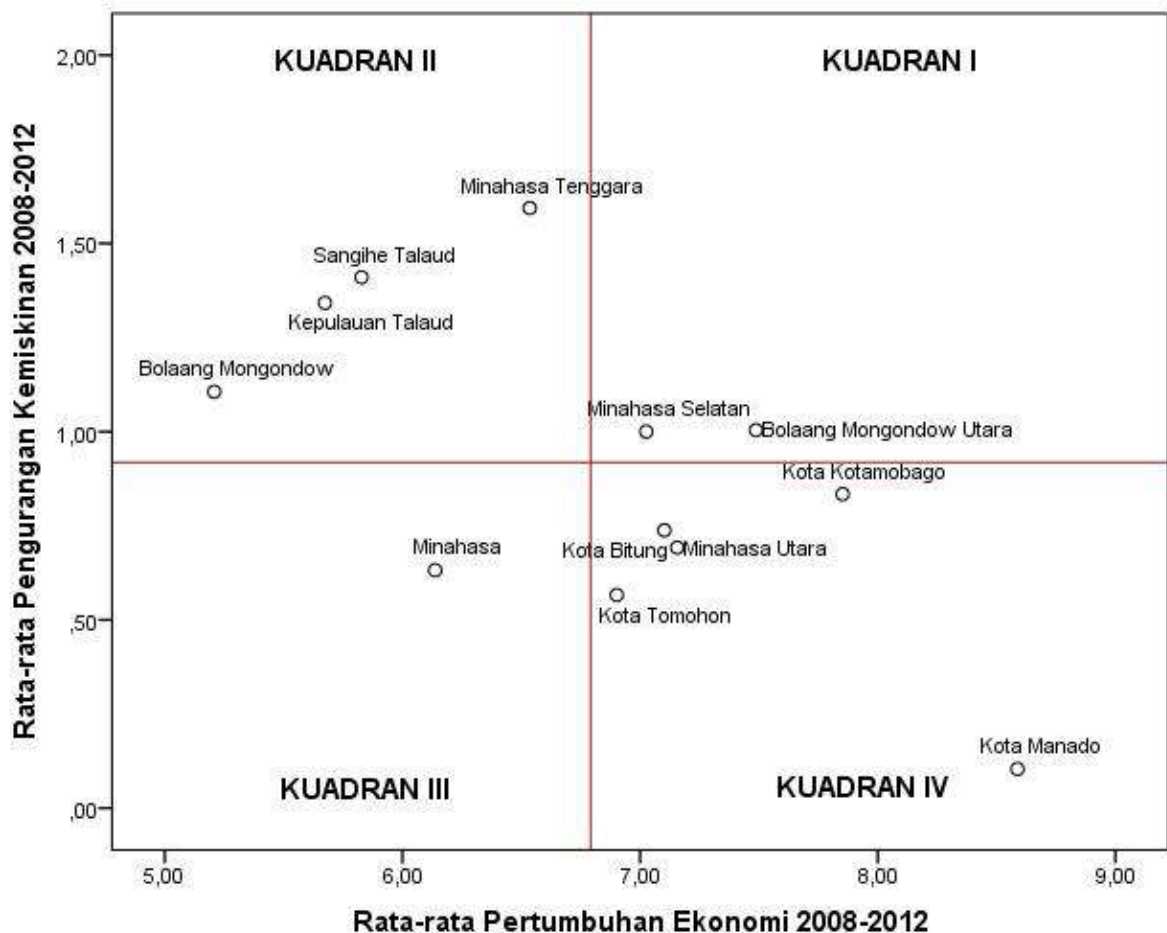
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Utara terletak di kuadran I, termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan..

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sangihe Talaud, Kepulauan Talaud, dan Bolaang Mongondow terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Minahasa terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota kotamobago, Kota Tomohon, dan Kota Manado terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah memningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

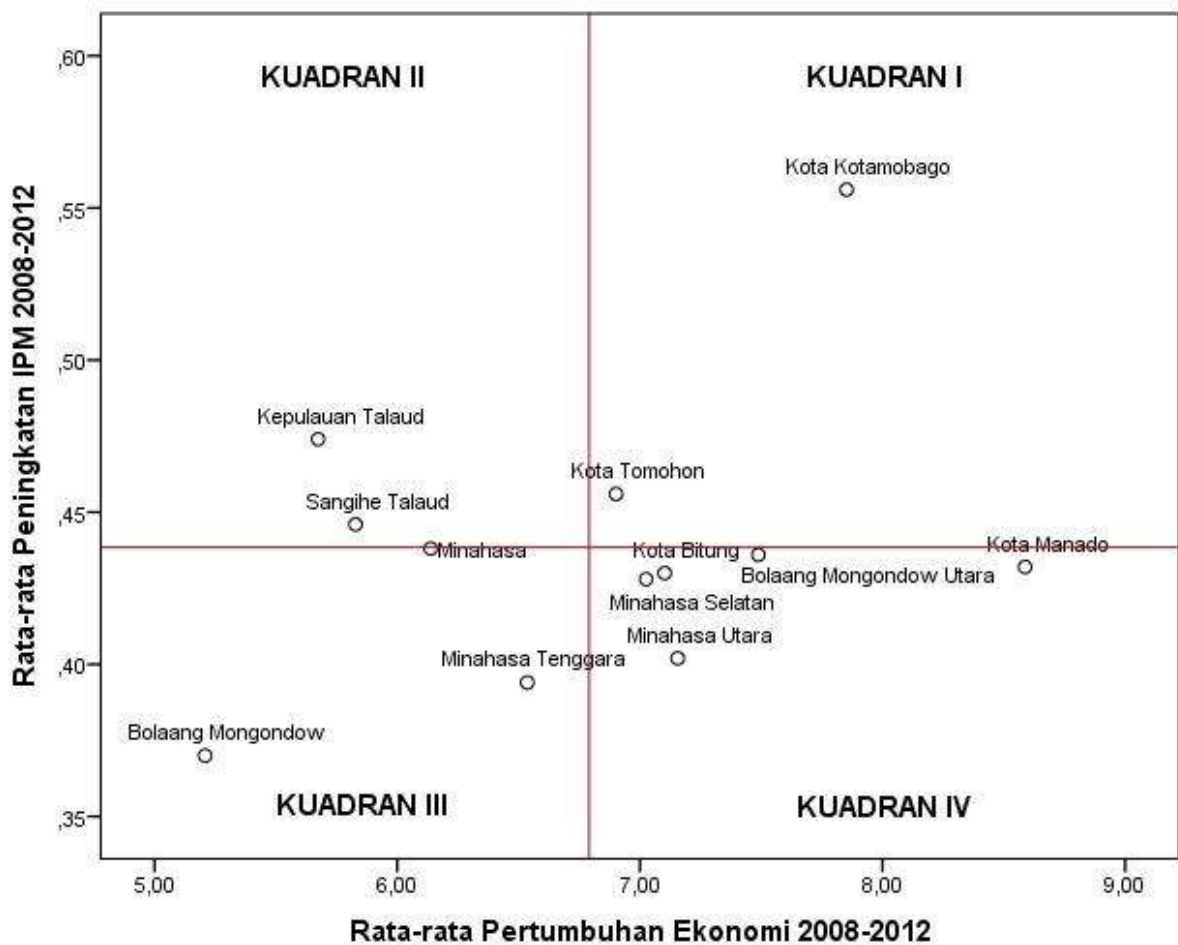
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kota Kotamobagoda dan Kota Tomohon terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Sangihe Talaud terletak di kuadran II yang termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas

dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa dan Minahasa Tenggara terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2012



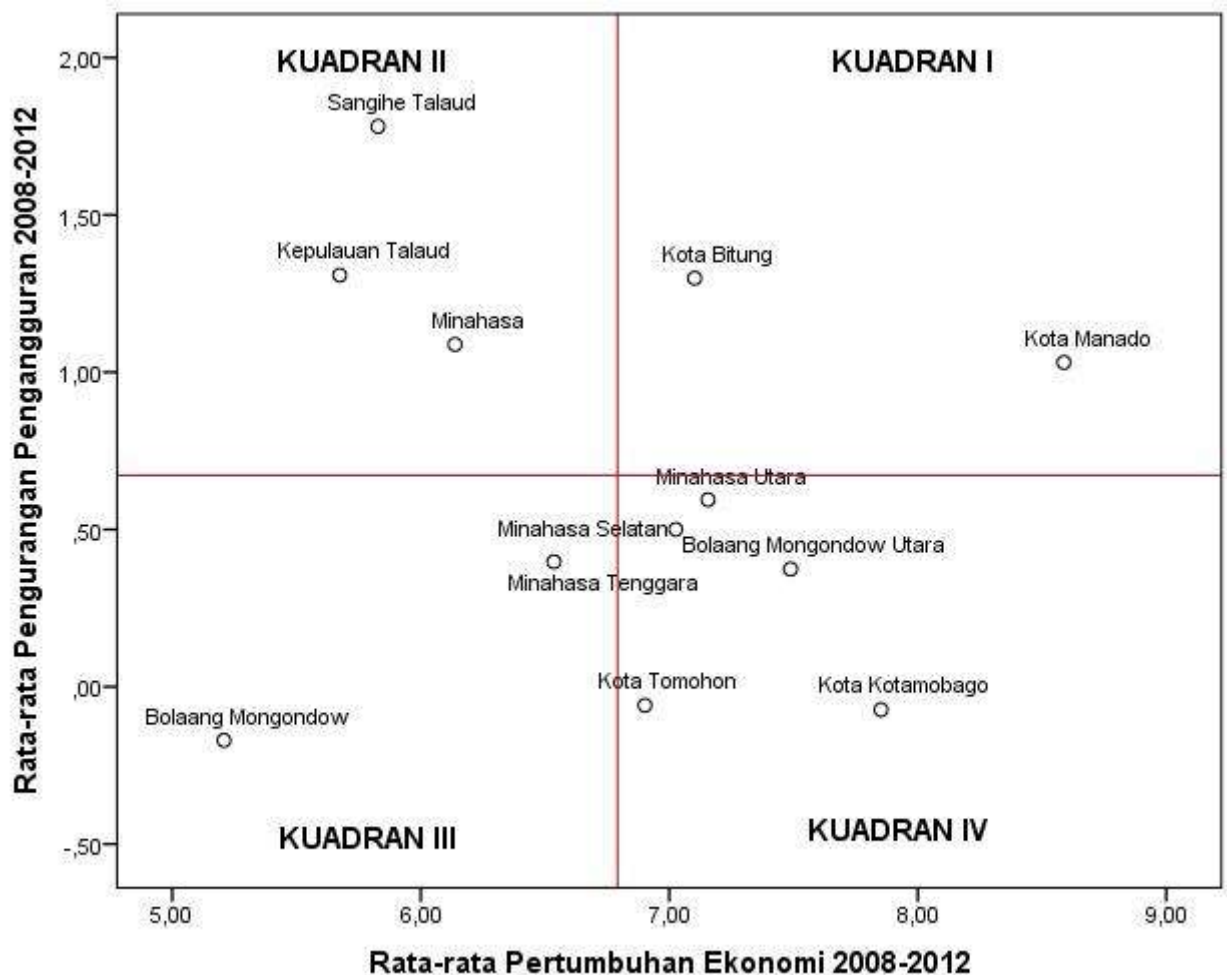
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara, Kota Bitung, dan Kota Manado terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kota Bitung dan Kota Manado terletak di kuadran I, termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Kepulauan Talaud, Minahasa, dan Sangihe Talaud yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini

mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Minahasa Tenggara terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

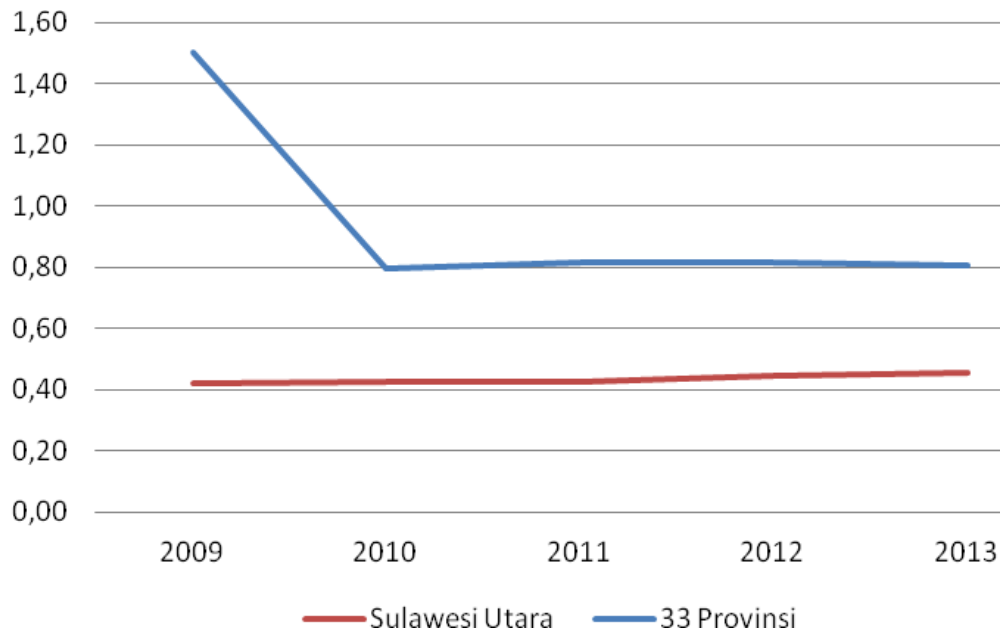
Keempat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobago terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 termasuk dalam kesenjangan sedang dan memiliki kecenderungan meningkat. Kesenjangan kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di atas menghadapi Sulawesi Utara pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara cukup tinggi walaupun distribusi pendapatannya kurang merata di seluruh kabupaten/ kota di provinsi ini, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). PDRB perkapita di Kota Bitung selalu menjadi yang tertinggi di Sulawesi Utara selama periode 2007-2012, sedangkan Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi yang terendah dalam periode yang sama. Letak Kota Bitung yang strategis secara ekonomis karena merupakan pintu Gerbang Kawasan Timur Indonesia dari utara menjadikan kota ini sebagai urat nadi perekonomian Sulawesi Utara. PDRB perkapita di Kota Bitung selalu menjadi yang tertinggi di Sulawesi Utara karena terdapatnya pelabuhan besar, banyaknya industri pengolahan, dan didukung jumlah penduduk yang tidak begitu banyak.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bolaang Mengondow	6.425	7.639	8.254	9.128	10.396	11.287
Minahasa	9.821	11.015	12.414	13.925	15.492	17.093
Sangihe Talaud	7.145	8.368	9.851	11.644	13.220	14.579
Kepulauan Talaud	7.061	7.528	8.269	9.151	10.476	11.376
Minahasa Selatan	9.125	10.434	11.728	13.204	15.195	16.675
Minahasa Utara	9.811	11.318	12.720	14.117	15.278	16.649
Bolaang Mangondow Utara	6.915	7.793	8.790	9.962	11.597	13.068
Minahasa Tenggara	5.803	6.805	7.900	9.257	11.413	13.295
Kep. Siau Tagulandang Biaro	11.725	13.327	15.215	16.961	19.463	21.380
Bolaang Mangondow Selatan	-	-	7.237	9.140	9.480	10.488
Bolaang Mangondow Timur	-	-	10.625	12.004	13.716	17.919
Kota Manado	18.509	21.572	25.721	28.858	32.278	37.419
Kota Bitung	16.328	17.827	19.167	20.497	22.303	24.840
Kota Tomohon	10.729	12.389	13.444	14.403	15.999	17.448
Kota Kotamubago	5.920	6.943	8.023	9.203	10.350	11.609
SULAWESI UTARA	10.993	12.939	14.712	16.149	18.217	20.345

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Kontribusi Sektor Primer Masih Cukup Tinggi dalam Perekonomian

Struktur perekonomian Sulawesi Utara didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, angkutan dan telekomunikasi, serta jasa-jasa (Tabel 2). Peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih rendah, bahkan industri pengolahan sendiri hanya berkontribusi sebesar 9 persen, sementara dukungan sektor utilitas untuk industri berkontribusi sangat kecil di bawah 1 persen. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar meliputi berbagai sektor seperti pertambangan, pariwisata, perindustrian, pertanian dan lain-lain. Dari sektor pertanian dihasilkan kelapa, cengkih, pala, kopi, vanilla. Dari sub-sektor perikanan dihasilkan tuna, cakalang, kerapu, rumput laut dan lain-lain, yang sudah diekspor dalam volume besar ke pasar Asia, Eropa, dan Amerika.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	19,33	17,15
2.	Pertambangan	4,51	4,84
3.	Industri Pengolahan	8,73	7,40
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,97	0,83
5.	Konstruksi	0,16	15,90
6.	Perdagangan, Hotel, Restauran	20,06	18,41
7.	Angkutan, Telekomunikasi	15,36	12,86
8.	Keuangan	8,28	7,38
9.	Jasa-jasa	22,06	15,22
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Berdasarkan analisis sektor basis terlihat kuatnya sektor pertanian dalam perekonomian. Sektor basis perekonomian di Sulawesi Utara antara lain pertanian (kecuali sub sektor tanaman pangan dan kehutanan), pertambangan, konstruksi, listrik dan air bersih, angkutan dan jasa-jasa (Tabel 3). Hal ini menunjukkan Sulawesi Utara memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor tersebut.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Sulawesi Utara Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,49	1,42	1,48	1,41	1,42
a. Tanaman Bahan Makanan	0,94	0,86	0,89	0,91	0,91
b. Tanaman Perkebunan	3,39	3,23	3,53	2,99	3,02
c. Peternakan	1,20	1,20	1,22	1,19	1,22
d. Kehutanan	0,39	0,38	0,36	0,34	0,35
e. Perikanan	1,98	1,97	1,95	1,90	1,83
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,63	0,62	0,65	0,67
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06
b. Pertambangan Bukan Migas	0,46	0,42	0,41	0,43	0,41
c. Penggalian	4,13	3,92	3,74	3,70	3,59
3. Industri Pengolahan	0,29	0,30	0,31	0,30	0,30
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,05	1,02	1,01	1,01	1,02
a. Listrik	1,27	1,33	1,33	1,27	1,26
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	1,58	1,59	1,60	1,64	1,67
5. Konstruksi	2,61	2,51	2,36	2,46	2,49
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,88	0,95	0,95	0,98	0,97
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,85	0,92	0,91	0,94	0,92
b. Hotel	2,38	2,72	2,75	2,80	2,81
c. Restoran	0,62	0,62	0,68	0,68	0,72
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,51	1,47	1,40	1,34	1,28
a. Pengangkutan	2,93	3,12	3,13	3,06	3,01
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	3,83	4,11	4,20	4,15	4,07
3). Angkutan Laut	5,92	6,67	7,10	7,24	7,24
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,25	0,32	0,30	0,28	0,26
5). Angkutan Udara	2,15	2,18	2,00	1,85	1,83
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,82	0,87	0,89	0,86	0,84
b. Komunikasi	0,34	0,31	0,29	0,28	0,26
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,69	0,69	0,70	0,70	0,71
a. Bank	0,83	0,84	0,88	0,88	0,91
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,42	0,43	0,43	0,43	0,42
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,69	0,69	0,68	0,69	0,68
e. Jasa Perusahaan	0,50	0,49	0,49	0,50	0,50

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
9. Jasa-jasa	1,65	1,61	1,60	1,60	1,63
a. Pemerintahan Umum	2,62	2,56	2,57	2,61	2,76
b. Swasta	0,90	0,88	0,88	0,88	0,85
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	1,50	1,47	1,50	1,51	1,47
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	1,11	1,13	1,12	1,12	1,10
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,64	0,63	0,62	0,62	0,60

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Untuk mengurangi ketergantungan pada kegiatan ekonomi primer, sektor industri pengolahan perlu dikembangkan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan, yang ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis. Ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja. Selama periode 2011-2014 sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan meskipun memberikan kontribusi kecil pada perekonomian (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian yang kurang produktif.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	332.981	342.694	9.713
2	Pertambangan	31.052	31.237	185
3	Industri Pengolahan	57.452	73.106	15.654
4	Listrik, Gas, Air	4.747	3.197	(1.550)
5	Bangunan	57.296	81.980	24.684
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	178.341	224.300	45.959
7	Angkutan & Telekomunikasi	97.458	87.272	(10.186)
8	Keuangan	19.300	22.503	3.203
9	Jasa-Jasa	183.021	208.895	25.874
	Total	961.648	1.075.184	113.536

Sumber: BPS, 2014

2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2006-2013 adalah konsumsi rumah tangga (Tabel 5). Peran investasi (PMTB) yang penting untuk pertumbuhan daerah hanya berkontribusi sebesar 27,78 persen, lebih rendah sektor konsumsi rumah tangga. Investasi memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi terutama dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Provinsi Sulawesi Utara hanya memperoleh porsi kecil dari investasi swasta. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi bagi calon investor mengenai potensi wilayah, meliputi komoditas unggulan, lokasi sebaran, potensi komoditas, cadangan potensi sumber daya alam yang dimiliki, ketersediaan lahan, infrastruktur penunjang, dan skala investasi di daerah tersebut.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Provinsi Sulawesi Utara harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan, peningkatan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana investasi yang memadai. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Tabel 5
PDRB Provinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan 2013

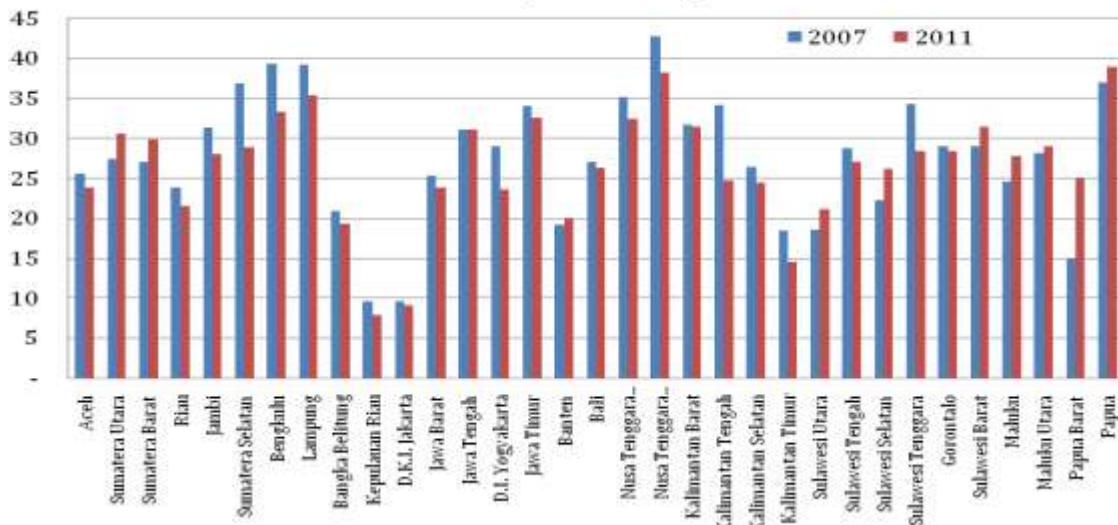
No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	46,02	27,38
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	3,03	32,10
3.	Konsumsi Pemerintah	27,78	15,27
4.	PMTB	27,13	15,88
5.	Perubahan Stok	1,37	0,96
6.	Ekspor	38,37	25,94
7.	Impor	43,71	29,61
	Total	100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Porsi pekerjaan kurang berkualitas di Sulawesi Utara menurun dari tahun 2007 ke 2011 namun masih termasuk tinggi secara nasional (Gambar 9).

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

Pada tahun 2011 persentase pekerjaan kurang berkualitas di Sulawesi Utara mencapai 22 persen. Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus sejalan dengan kebijakan pembangunan di sektor industri karena rendahnya produktivitas pertanian. Pengembangan industri dapat diarahkan pada industri berbasis pertanian dalam arti luas, seperti agroindustri yang didukung oleh agrobisnis.

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Sulawesi Utara merupakan pintu gerbang Indonesia dan provinsi khususnya di bagian Timur Indonesia terhadap perdagangan internasional. Sulawesi Utara terhubung dengan provinsi lainnya di Sulawesi oleh jaringan jalan lintas utama Sulawesi. Secara keseluruhan wilayah Sulawesi Utara dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 8019 km. Tingkat kerapatan jalan di Sulawesi Utara lebih tinggi daripada nasional dan relatif baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia (Tabel 6). Tingkat kerapatan jalan merupakan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen.

Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

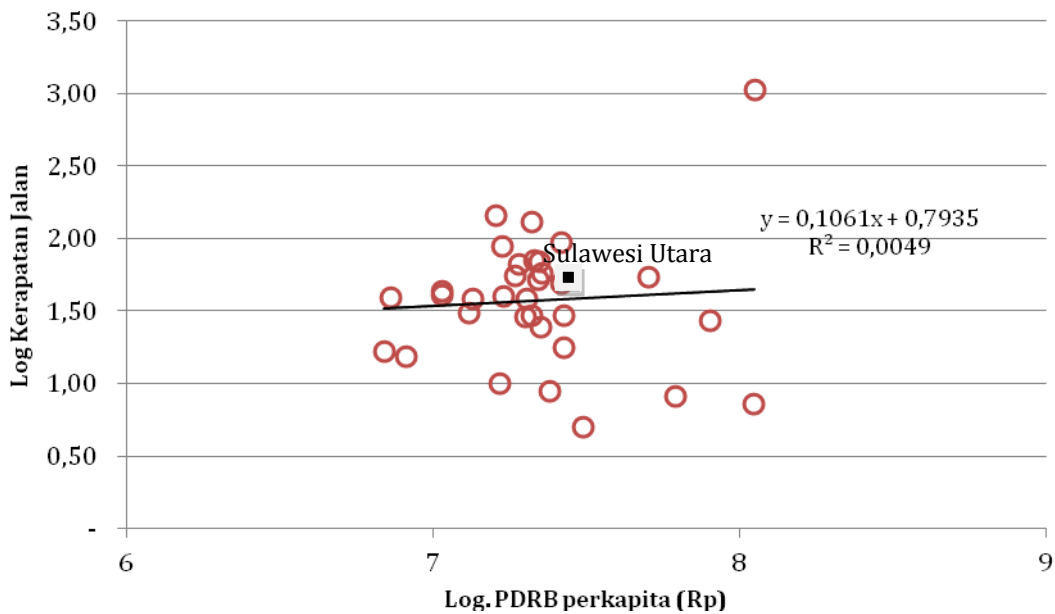
No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dapat dianalisis dengan membandingkan wilayah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita setara. Hal ini didasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian. Dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah, kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Sulawesi Utara relatif lebih baik dibandingkan perekonomian dengan tingkat pendapatan per kapita yang sama. Dengan demikian panjang jalan bukanlah masalah utama bagi Sulawesi Utara.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Sulawesi Utara relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Sulawesi Utara sudah mencapai 81 persen (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik

Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

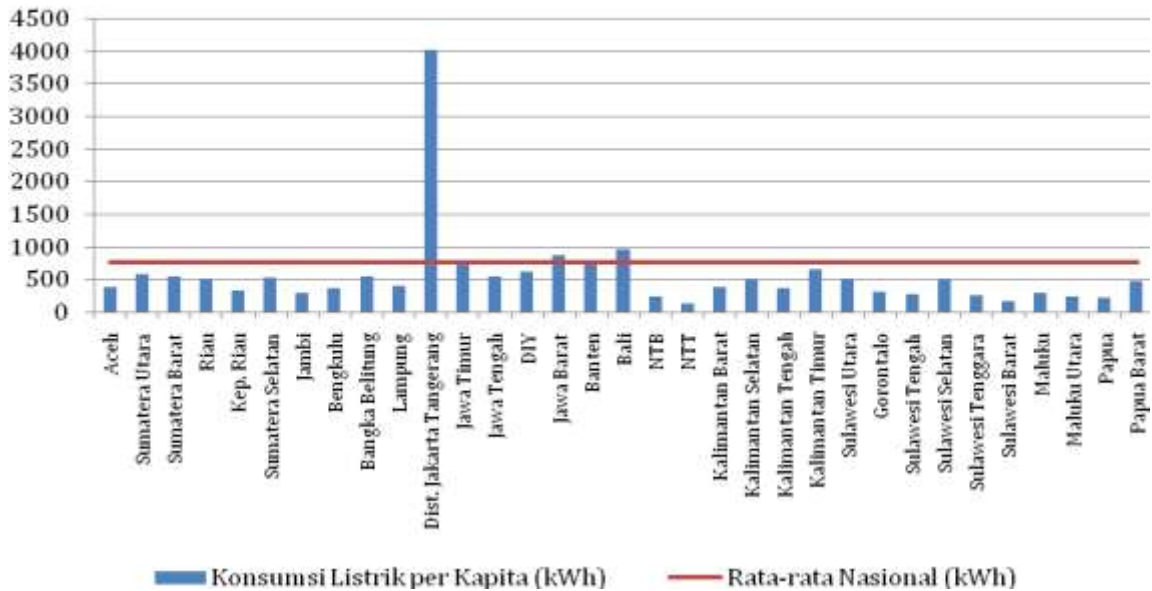
PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Sulawesi Utara	764	81	102	11	71	8	4	0	1.873	100
Sulawesi	5.103	81	678	11	469	8	24	0	6.274	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Sulawesi Utara termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian,

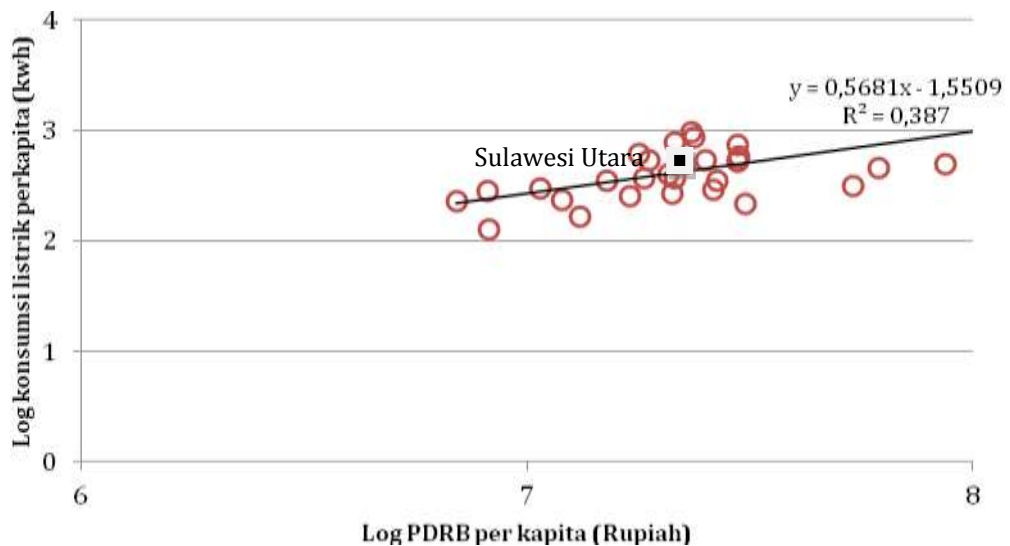
konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Sulawesi Utara berada sedikit di atas kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik Sulawesi Utara lebih tinggi dari di wilayah lain yang memiliki pendapatan perkapita sama. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik bukan menjadi masalah utama di Sulawesi Utara.

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: BPS, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

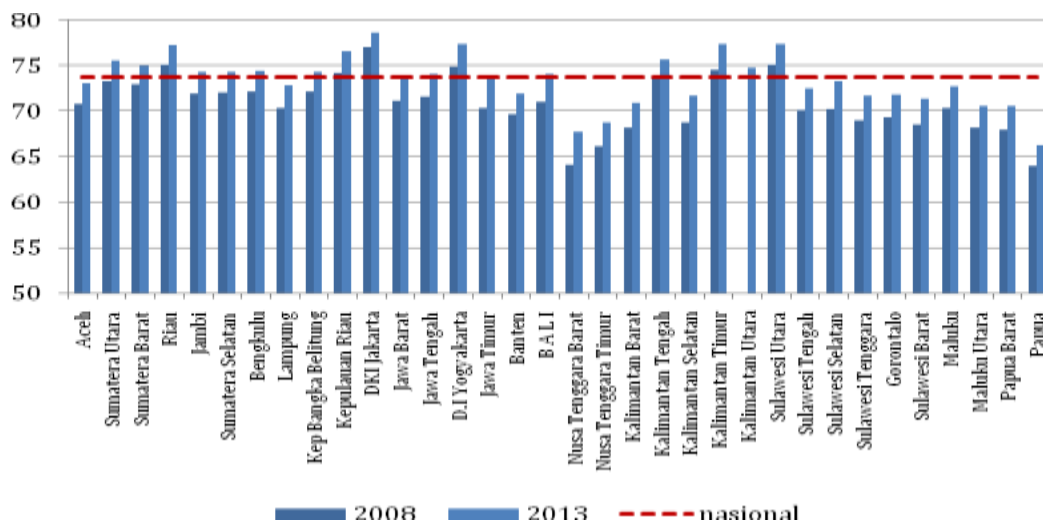


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) – diolah

5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Utara yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 walaupun masih di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2012



Sumber: BPS, 2013

IPM Sulawesi Utara tergolong tinggi karena berada pada peringkat 3 secara nasional (di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 77,36. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 72,01 tahun pada tahun 2008 menjadi 72,62 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Utara meningkat dari 8,8 tahun pada 2008 menjadi 9,09 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Sulawesi Utara pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 99,31 menjadi 99,56 persen, lebih tinggi dari capaian nasional 94,14 persen.

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Sulawesi Utara dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 40,70 persen pada tahun 2008 menjadi 43,01 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan kualitas angkatan kerja ini menjadi modal berharga mendukung industrialisasi berbasis pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	389.014	427.737	38.723
2	SMTP	216.389	232.979	16.590
3	SMTA Umum	325.720	372.329	46.609
5	Diploma I/II/III/Akademi	27.200	29.874	2.674
6	Universitas	62.629	96.506	33.877
Total		1.020.952	1.159.425	138.473

Sumber: BPS, 2014

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Rasio pinjaman terhadap simpanan di Sulawesi Utara nilainya lebih besar dari satu dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Sulawesi Utara, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Sebagai perbandingan, rasio pinjaman terhadap simpanan tahun 2013 untuk wilayah Sulawesi adalah 1,47 dan rasio untuk nasional adalah 0,92 (Tabel 9).

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan
Sulawesi Utara	17.658	26.390	1,49
Sulawesi	104.086	153.356	1,47
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92

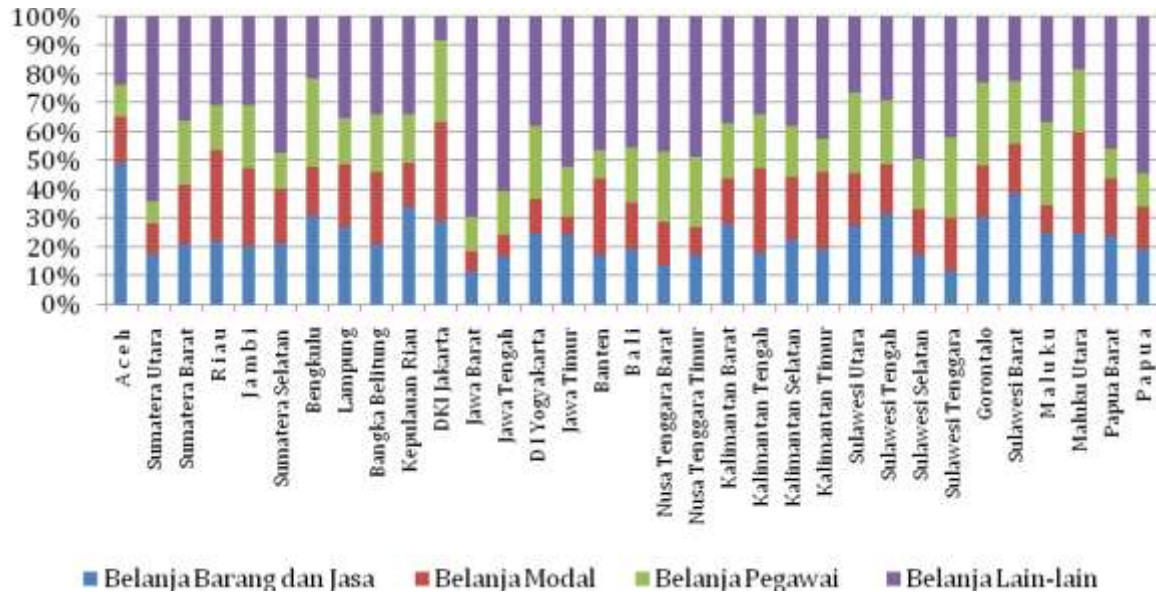
Sumber: BPS, 2014

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Utara perlu meningkatkan kualitas komposisi anggarannya. Serapan belanja modal menunjukkan kinerja yang cukup rendah. Porsi belanja modal dalam total APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Utara sebesar 18,34 persen (Gambar 14). Sementara itu, komposisi dari belanja barang dan jasa sebesar 27,56 persen, belanja pegawai sebesar 28,04 persen, dan belanja lain-lain sebesar 26,06 persen.

Belanja modal memiliki dampak langsung terhadap perekonomian sehingga perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini perlu lebih diarahkan pada belanja modal (komponen investasi). Investasi pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian karena merupakan perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2014

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi strategis karena terletak di pasifik Rim yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara Asia Timur dan negara-negara Pasifik sehingga menjadi lintasan dia benua (Asia dan Australia) dan dua Samudra (Samudra India dan Samudra Pasifik). Posisi strategis ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Peluang investasi di Sulawesi Utara meliputi bidang agro industri, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan melihat berbagai kondisi dan potensi daerah serta peluang Sulawesi Utara di era Pasifik maupun global, potensi unggulan Sulawesi Utara ada di sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.

Kehidupan sosial ekonomi di Sulawesi Utara terus berkembang, yang diikuti oleh meningkatnya pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta meningkatnya pembangunan infrastruktur. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami peningkatan dari angka 0,28 menjadi 0,42, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Sulawesi Utara tergolong tinggi secara nasional, yang menjadi ancaman terhadap suasana kondusif bagi upaya penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Percepatan pengembangan ekonomi Sulawesi diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Sulawesi Utara dijadikan hub internasional secara regional Sulawesi dan Nasional. Selain proyek-proyek infrastruktur

utama yang secara langsung melewati Sulawesi Utara, proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan lainnya juga diperkirakan akan hanya memberi manfaat besar pada Sulawesi Utara khususnya sebagai provinsi yang melayani provinsi lain dalam perdagangan internasional. Namun demikian hal ini sangat bergantung pada aksesibilitas wilayah Sulawesi Utara dan konektivitasnya dengan Provinsi lainnya di Sulawesi.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, dapat digambarkan prospek Sulawesi Utara dalam mencapai target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,1 – 8,3 persen dapat tercapai. Di Kawasan Timur Indonesia kinerja ekonomi akan semakin membaik berkat meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi para penambang besar. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara telah meningkat pada akhir 2014 melebihi perkiraan sebelumnya. Sulawesi Utara memiliki sumber daya alam melimpah yang berpotensi untuk terus meningkatkan PDRB di wilayah ini.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 7,1 – 5,1 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,9 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Sulawesi Utara harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,8 poin persentase atau 0,47 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Sulawesi Utara akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Sulawesi Utara maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas, produksi, dan kualitas komoditas sektor pertanian
- b. Industrialisasi yang mendukung pengelolaan produk turunan sektor pertanian dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- f. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.